



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN ORGANISASI

NOMOR SOP	SETDA 11.84
TGL PEMBUATAN	7 Januari 2020
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	7 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH Drs. SUTARNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630103 198812 1 001
NAMA SOP	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI BIDANG KETATALAKSANAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60/2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.60/2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (<i>Business Process</i>) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 6. Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur bidang ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah	1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Memahami teknis penyusunan produk hukum 3. Memiliki tingkat kecermatan dan ketelitian yang tinggi 4. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Produk Hukum 2. SOP Surat Menyurat 3. SOP Penyelenggaraan Rapat	1. Laptop dan Printer 2. ATK 3. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak menyusun produk hukum di bidang ketatalaksanaan, maka instansi pemerintah tidak memiliki pedoman bagi organisasi di bidang tata laksana yang meliputi (pakaian dinas, TND, SOP, proses bisnis, dan lainnya terkait ketatalaksanaan)	Penyusunan produk hukum di bidang ketatalaksanaan diperlukan penyempurnaan sesuai pedoman dan dasar regulasi yang berlaku, untuk itu data awal pembuatan maupun hasil revisi agar disimpan sebagai dokumentasi.

